

Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Lahan pada Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Adinda Kusuma Dewi¹

Diterima : 20 Desember 2012 Disetujui : 23 Januari 2013

ABSTRACT

In 2010 the Indonesian government established the KBR program (Kebun Bibit Rakyat – Community Nursery) through participatory rehabilitation and cultivation of critical, barren or unproductive lands. The program aimed to maintain the environmental carrying capacity, thus reducing forest and farmland degradation. The study examines community participation in the KBR program and its potential for sustainability in Plukaran Village, Gembong district, Pati Regency. The study combined quantitative and qualitative approach; sampling was conducted randomly and supported by interviews with selected informan. The study applies descriptive analysis using theories of participatory by Pomeroy and Williams (1994). The study has identified the level of community participation in the planning, commencement and evaluation of the program. At the planning stage, community participation varies from informing to consultation. At the commencement stage, community participation varies from informing, cooperation to community control. At the evaluation stage, it was found to be at the informing level. The study also found that the program has been commenced effectively, however, equity still needs to be attained in order to ensure the program's sustainability.

Key words: community participation, land rehabilitation, KBR (Kebun Bibit Rakyat – Community Nursery)

ABSTRAK

Pada tahun 2010 pemerintah Indonesia mencanangkan program Kebun Bibit Rakyat (KBR) melalui kegiatan rehabilitasi dan penanaman lahan kritis, kosong atau tidak produktif secara partisipatif. Program ini bertujuan menjaga kualitas daya dukung lingkungan untuk mengurangi degradasi hutan dan lahan. Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam program KBR dan potensi keberlanjutannya di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif; pengambilan sampel dilakukan secara random dan didukung wawancara terhadap informan terpilih. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan teori partisipasi menurut Pomeroy dan Williams (1994). Studi ini telah berhasil mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi pada tingkat informing dan consultation. Pada tahap pelaksanaan, tingkat partisipasi masyarakat bervariasi antara tingkat informing, cooperation, dan community control. Pada tahap evaluasi tingkat partisipasi masih berada pada tahap informing. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan program telah efektif namun equity masih perlu dicapai untuk memastikan keberlanjutan program.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, rehabilitasi lahan, KBR (Program Kebun Bibit Rakyat)

¹ Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun, Semarang, Jawa Tengah Kontak Penulis : dindut7@yahoo.com

PENDAHULUAN

Kabupaten Pati dengan luas wilayah 158.208,74 Ha memiliki sebaran lahan kritis sebagai berikut: luas lahan sangat kritis 2.235,16 Ha, lahan kritis seluas 6.075,51 Ha, lahan agak kritis seluas 9.242,38 Ha, lahan potensial kritis seluas 31.402,52 Ha, dan lahan tidak kritis seluas 109.253,18 Ha (BPDAS Pemali Jratun, 2009). Tingkat kekritisan lahan tersebut ditunjukkan dengan menurunnya penutupan vegetasi permanen dan meluasnya lahan kritis. Dalam rangka rehabilitasi lahan kritis di Kabupaten Pati tersebut dilaksanakan Program Kebun Bibit Rakyat tahun 2010 pada 42 desa di 17 kecamatan dengan jumlah bibit tiap desa sebanyak 50.000 batang.

Salah satu sasaran lokasi Program Kebun Bibit Rakyat yang menjadi wilayah dalam studi ini adalah Desa Plukaran Kecamatan Gembong. Desa Plukaran Kecamatan Gembong merupakan kawasan lereng Gunung Muria yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010, sehingga perlu dilakukan strategi peningkatan kualitas perlindungan melalui kegiatan penghijauan/rehabilitasi. Berdasarkan data dari BPDAS Pemali Jratun (2009), sebaran lahan kritis di Desa Plukaran Kecamatan Gembong yang memiliki luas wilayah 403,08 Ha adalah luas lahan sangat kritis 40,27 Ha, lahan kritis seluas 89,39 Ha, lahan agak kritis seluas 102,50 Ha, lahan potensial kritis seluas 133,29 Ha, dan lahan tidak kritis seluas 37,64 Ha.

Desa Plukaran Kecamatan Gembong termasuk dalam Sub DAS Sani merupakan daerah hulu Sungai Juwana. Berdasarkan data tingkat kerawanan bahaya banjir (SIMDAS Bahaya Banjir BPDAS Pemali Jratun, 2009), Sub DAS Sani memiliki tingkat kerawanan ekstrim tertinggi yaitu sebesat 15,23% dibandingkan dengan Sub DAS lain di DAS Juana. Hal tersebut dibuktikan dengan kejadian banjir yang terjadi setiap tahun di daerah hilir yaitu Kota Pati maupun di daerah sepanjang aliran Sungai Sani.

Program Kebun Bibit Rakyat yang dilaksanakan di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dilaksanakan pada tahun 2010. Program ini bertujuan untuk menyediakan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna yang prosesnya dibuat secara swakelola oleh kelompok tani. Bibit hasil Kebun Bibit Rakyat tersebut digunakan untuk merehabilitasi dan menanam di lahan kritis, lahan kosong, dan lahan tidak produktif di wilayahnya. Selain itu dengan dilaksanakan Program Kebun Bibit Rakyat diharapkan hasil tanaman dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraannya. Sehingga keberhasilan program Kebun Bibit Rakyat akan mewujudkan perbaikan sumber daya lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan pada Program Kebun Bibit Rakyat di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati memerlukan adanya pemberian tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat untuk merencanakan sampai dengan proses pelaksanaan maupun pemeliharaan yang semuanya dilakukan oleh masyarakat melalui pendampingan Penyuluh Lapangan Kebun Bibit Rakyat (PL KBR). Berdasarkan uraian diatas, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan pada Program Kebun Bibit Rakyat di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan pada Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui analisis statistik deskriptif menggunakan teknik distribusi frekuensi merupakan analisis yang menggunakan statistik sederhana (mean dan modus). Teknik ini digunakan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan pada Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Plukaran. Sedangkan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui pandangan pihak terkait mengenai partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan pada Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Plukaran. Analisis tingkat partisipasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan Teori Tingkat Partisipasi Pomeroy dan Williams (1994) berdasarkan data distribusi frekuensi jawaban responden yang kemudian dilakukan triangulasi melalui wawancara terhadap narasumber yang memiliki informasi mengenai Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Plukaran. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dilakukan penilain berdasarkan indikator kuntitatif dan kualitatif yang telah disusun berdasarkan Teori Tingkat Partisipasi Pomeroy dan Williams (1994).

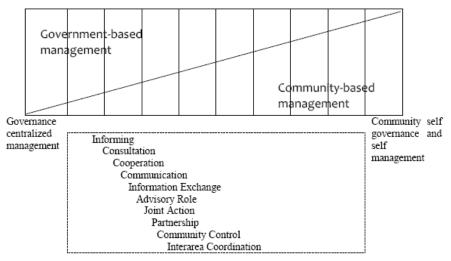
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 cara yakni pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian dari informan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Tahap pertama menggunakan teknik purposive sampling dan pada tahap kedua Metode ini dipilih dengan asumsi bahwa semua anggota populasi yaitu anggota Kelompok Tani Sido Makmur memiliki karakter yang homogen. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan presisi 10% terhadap 189 anggota kelompok tani diperoleh jumlah sampel sebanyak 65 orang.

KAJIAN TEORI

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Degradasi lahan merupakan masalah utama lingkungan yang mengakibatkan terjadinya lahan kritis. Menurut Kartodihardjo dan Supriono (2000) dalam Nawir et al (2008), lahan kritis didefinisikan sebagai lahan terdegradasi yang harus direboisasi.

Menurut Permenhut Nomor P.24/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat, disebutkan bahwa KBR merupakan fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (*Multi Purpose Tree Species*/ MPTS) yang prosesnya dibuat secara swakelola oleh kelompok tani. Bibit hasil KBR digunakan untuk merehabilitasi dan menanam di lahan kritis, lahan kosong, dan lahan tidak produktif di wilayahnya. Di samping itu, KBR juga dipakai sebagai sarana untuk mengurangi terjadinya resiko sosial berupa kemiskinan akibat degradasi hutan dan lahan serta sebagai tempat pemberian pengetahuan dan keterampilan mengenai pembuatan persemaian dan penanaman dengan menggunakan benih/bibit berkualitas.

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam pelaksanaan Program KBR tersebut. PBB dalam Slamet (1994) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda seperti (1) di dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, (2) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela, serta (3) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek. Oleh sebab itu, perlibatan seseorang dalam berpartisipasi harus dilakukan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan operasinya. Menurut Pomeroy dan Williams (1994) dalam Budiati (2012), tingkat partisipasi stakeholders diawali dengan informasi hingga pembagian koordinasi. Adapun tingkatan partisipasi tersebut seperti pada Gambar 1 berikut:



GAMBAR 1
TINGKAT PARTISIPASI (POMEROY DAN WILLIAMS, 1994)

GAMBARAN UMUM

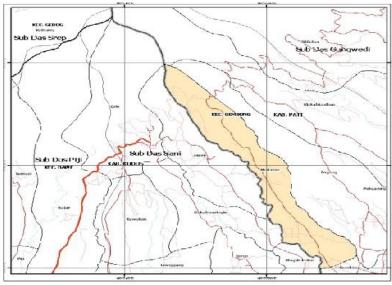
Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati terbagi menjadi 6 dukuh, 24 Rukun Tetangga (RT) dan 9 Rukun Warga (RW). Batas-batas wilayah Desa Plukaran sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bageng, Kecamatan Gembong Sebelah Selatan : Desa Gembong, Kecamatan Gembong

Sebelah Barat : Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus

Sebelah Timur : Desa Bageng, Kecamatan Gembong

Pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dilaksanakan pada tahun 2010. Desa Plukaran merupakan desa yang memenuhi kriteria untuk pelaksanaan KBR kriteria tersebut diantaranya adalah merupakan wilayah yang berada pada DAS Prioritas yaitu DAS Juwana Sub DAS Sani, memiliki lahan kritis, lahan kosong atau tidak produktif, mata pencaharian penduduknya bergantung pada sektor pertanian secara umum (kehutanan, perkebunan, pertanian) dan terdapat kelompok pengelola yang bertanggungjawab. Program Kebun Bibit Rakyat di Desa Plukaran dilaksanakan pada tahun 2010 oleh kelompok tani Sido Makmur yang diketuai oleh Rustam memiliki anggota sebanyak 189 orang. Lokasi persemaian Program Kebun Bibit Rakyat di Desa Plukaran adalah di Blok Gilan. Bibit tanaman yang dibuat adalah jati, sengon dan kopi. Gambar wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



GAMBAR 2 WILAYAH STUDI

ANALISIS

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, analisis dalam penelitian ini dibagi ke dalam 3 analisis yakni : (1) Analisis partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan; (2) Analisis partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan, dan (3) Analisis partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi.

<u>Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan</u>

Tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan pada Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahap perencanaan dianalisis berdasarkan variabel prakarsa dan pengambilan keputusan. Indikator yang digunakan untuk variabel prakarsa adalah sumber ide dasar dan sumber usulan kegiatan. Sedangkan indikator yang digunakan untuk variabel pengambilan keputusan adalah pihak pengambil keputusan dan apakah proses pengambilan keputusan sudah aspiratif. Hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif adalah seperti pada Tabel 1 berikut.

TABEL 1
ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA TAHAP PERENCANAAN

No.	Variabel	Indikator		Tingkat Partisipasi
1.	Prakarsa:	Kualitatif	- Ide dasar berasal dari pemerintah	Informing
	- Sumber ide		– Pemerintah hanya memberi	
	dasar		informasi tentang adanya	
			program secara satu arah	
		Kuantitatif	Jawaban pemerintah dipilih ≥ 50%	
			responden	
	- Sumber usulan	Kualitatif	– Usulan kegiatan berasal dari	Consultation
	kegiatan		masyarakat tetapi keputusan di	
			tangan pemerintah	
			 Pendapat masyarakat didengar 	

No.	Variabel	Indikator		Tingkat Partisipasi
			tapi keputusan diambil oleh pemerintah	
		Kuantitatif	Jawaban masyarakat dipilih ≥ 50% responden	
2.	Pengambil keputusan: - Pihak pengambil keputusan	Kualitatif	 Masyarakat dapat memberi usulaan tetapi keputusan diambil oleh pemerintah Pendapat masyarakat didengar tapi keputusan diambil oleh pemerintah 	Consultation
		Kuantitatif	Jawaban pemerintah dipilih ≥ 50% responden	
	- Apakah proses pengambilan keputusan sudah aspiratif	Kualitatif	 Proses pengambilan keputusan tidak demokratis karena keputusan ditentukan oleh pemerintah Pendapat masyarakat didengar tapi keputusan diambil oleh pemerintah 	Consultation
		Kuantitatif	Jawaban tidak dipilih ≥ 50% responden	

Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pelaksanaan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan pada Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahap pelaksanaan dianalisis berdasarkan variabel pembiayaan, mobilisasi tenaga dan penyelesaian masalah. Indikator yang digunakan untuk variabel pembiayaan adalah sumber pembiayaan. Indikator untuk variabel mobilisasi tenaga adalah penggerak masyarakat untuk mengikuti kegiatan. Sedangkan indikator yang digunakan untuk variabel penyelesaian masalah adalah siapakah yang menyelesaikan permasalahan. Hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif adalah seperti pada Tabel 2 berikut.

TABEL 2 ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP PELAKSANAAN

No.	Variabel	Indikator		Tingkat Partisipasi
1.	Pembiayaan: - Sumber pembiayaan	Kualitatif	 Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari pemerintah Pemerintah hanya memberi informasi tentang adanya anggaran program secara satu arah 	Informing
		Kuantitatif	Jawaban pemerintah dipilih ≥ 50% responden	
2.	Mobilisasi tenaga: - Penggerak masyarakat untuk mengikuti kegiatan	Kualitatif	 Penggerak masyarakat untuk mengikuti program adalah masyarakat sendiri dengan mempengaruhi masyarakat lain untuk ikut serta 	Community Control

No.	Variabel	Indikator		Tingkat Partisipasi
			 Masyarakat memiliki kekuatan mengatur program 	
		Kuantitatif	Jawaban masyarakat dipilih ≥ 50% responden	
3.	Penyelesaian Masalah	Kualitatif	 Masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan Masyarakat mulai mempunyai pengaruh meskipun dalam berbagai hal ditentukan pemerintah 	Cooperation
		Kuantitatif	 Jawaban masyarakat dipilih ≥ 45% responden Jawaban pemerintah dipilih ≥ 45% responden 	

Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Evaluasi

Tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan pada Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahap evaluasi dianalisis berdasarkan variabel monitoring dan evaluasi dengan indikator siapa yang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif adalah seperti pada Tabel 3 berikut.

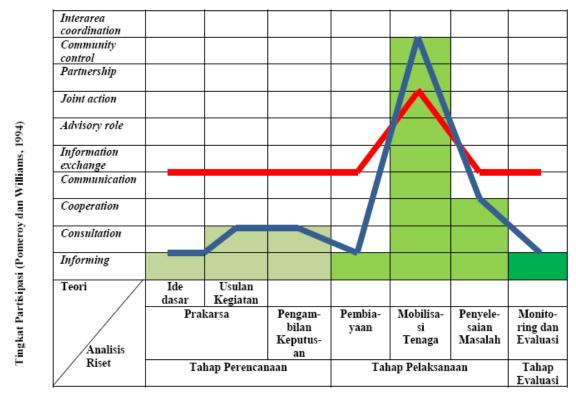
TABEL 3 ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP EVALUASI

No.	Variabel	Indikator		Tingkat Partisipasi
1.	Monitoring dan Evaluasi	Kualitatif	 Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah Pemerintah hanya memberi informasi tentang adanya anggaran program secara satu arah 	Informing
		Kuantitatif	Jawaban pemerintah dipilih ≥ 50% responden	

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Kondisi Ideal dan Faktual Partisipasi Masyarakat

Kondisi tingkat partisipasi masyarakat dalam tiap tahap kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Plukaran menggunakan Teori Tingkat Partisipasi Pomeroy dan Williams (1994) dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat ideal di Desa Plukaran adalah seperti pada Gambar 3 berikut.



Tahapan Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Keterangan: = Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Plukaran = Tingkat partisipasi masyarakat ideal di Desa Plukaran

GAMBAR 3 TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT MENGGUNAKAN TEORI POMEROY DAN WILLIAMS (1994)

Berdasarkan Gambar 3 di atas, secara umum dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan berada pada tingkat yang rendah yaitu hanya pada level pertama (informing) dan ke dua (consultation). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) peran pemerintah masih cukup dominan sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah. Dalam hal ini ide dasar program berasal dari pemerintah, usulan kegiatan meskipun berasal dari masyarakat namun dalam penyusunan proposal harus berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang dibuat pemerintah, selain itu pengambilan keputusan juga ditetapkan oleh pemerintah meskipun masyarakat diberi kesempatan menyampaikan usulan.

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan berada pada level tertinggi dibandingkan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mendapatkan sosialisasi pada tahap perencanaan, masyarakat dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu tingginya partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan juga dipengaruhi oleh adanya tokoh masyarakat (ketua kelompok tani dan kepala desa) yang menjadi penggerak dan motivator masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Slamet (1994) bahwa partisipasi dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya.

Selanjutnya pada tahap evaluasi tingkat partisipasi kembali menurun karena belum terbentuknya mekanisme monitoring dan evaluasi dalam bentuk tim antara masyarakat dan pemerintah. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah yaitu Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati bertujuan untuk mengetahui perkembangan program dan penyusunan laporan. Sedangkan masyarakat atau kelompok tani melakukan monitoring bertujuan sebagai dasar pembuatan laporan bulanan.

Idealnya tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan di Desa Plukaran pada tahap perencanaan untuk variabel prakarsa dan pengambilan keputusan berada pada level communication. Tingkat partisipasi masyarakat ideal pada level ini disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya manusia di Desa Plukaran yang masih rendah. Sedangkan tingkat partisipasi ideal pada tahap pelaksanaan adalah berada pada level communication untuk variabel pembiayaan dan penyelesaian masalah serta pada level joint action untuk variabel mobilisasi tenaga. Sebagaimana pada tahap perencanaan, kondisi ideal tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan untuk variabel pembiayaan dan penyelesaian masalah adalah pada level communication. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat di Desa Plukaran yang masih rendah sehingga kemampuan mereka dalam hal penyelesaian masalah masih kurang. Demikian juga dalam hal pembiayaan, kondisi kemiskinan di Desa Plukaran yang didominasi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejaahtera II (BPS, 2010) berimplikasi pada rendahnya kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam membiayai suatu kegiatan. Sehingga untuk variabel pembiayaan dan penyelesaian masalah apabila masyarakat telah mampu berkomunikasi dengan pemerintah untuk bekerjasama dalam pembiayaan dan penyelesaian masalah dikatakan telah dapat mencapai tingkat partisipasi ideal.

Sedangkan tingkat partisipasi ideal untuk variabel mobilisasi tenaga berada pada level joint action. Hal ini disebabkan adanya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan di sekitar mereka setelah mendapatkan sosialisasi mengenai program dari pemerintah. Selain itu mobilisasi masyarakat juga didorong oleh adanya tokoh masyarakat yang menjadi penggerak atau motivator warga untuk berperan serta dalam Program Kebun bibit Rakyat (KBR) secara suka rela. Sehingga untuk variabel mobilisasi tenaga, apabila penggerak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat secara proporsional maka dapat dikatakan telah mencapai tingkat partisipasi ideal.

Tingkat partisipasi ideal pada tahap evaluasi adalah berada pada level communication. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat di Desa Plukaran yang masih rendah sehingga kemampuan mereka dalam hal monitoring dan evaluasi masih sangat kurang. Sehingga untuk variabel monitoring dan evaluasi apabila masyarakat telah mampu berkomunikasi dengan pemerintah untuk bekerjasama dalam kegiatan monitoring dan evaluasi melalui mekanisme monitoring dan evaluasi dalam bentuk tim, maka dikatakan telah dapat mencapai tingkat partisipasi ideal. Namun berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan di Desa Plukaran sebagian besar belum mencapai tingkat partisipasi ideal. Pada tahap perencanaan tingkat partisipasi masyarakat hanya sampai level informing dan consultation dengan kondisi ideal pada level communication. Demikian juga pada tahap pelaksanaan tingkat partisipasi untuk variabel pembiayaan pada level informing dan untuk variabel penyelesaian masalah pada level cooperation, yang idealnya berada pada level community control yang melebihi level partisipasi idealny yaitu joint action. Pada tahap evaluasi tingkat partisipasi berada pada level informing yang idealnya berada pada level communication.

Perbedaan atau gap antara tingkat partisipasi ideal dan tingkat partisipasi faktual hasil analisis dengan kecenderungan tingkat partisipasi faktual lebih rendah dari pada tingkat partisipasi ideal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah *leadership* atau kepemimpinan masyarakat dan pemerintah, kelembagaan masyarakat, dan kebijakan.

Kepemimpinan masyarakat oleh ketua kelompok tani belum mampu mencapai tingkat partisipasi masyarakat ideal pada tahap perencanaan, pelaksanaan untuk variabel pembiayaan dan penyelesaian masalah, dan pada tahap evaluasi. Hal ini disebabkan karena lemahnya posisi masyarakat yang seolah-olah hanya menjadi obyek program saja pada kedua tahap ini. Pada tahap perencanaan, sosialisasi mengenai Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) hanya secara satu arah sehinga bargaining power kelompok tani sangat lemah. Sedangkan pada tahap pelaksanaan khususnya pada variabel mobilisasi warga kepemimpinan masyarakat khususnya ketua kelompok tani sangat baik hingga mencapai tingkat partisipasi masyarakat diatas tingkat partisipasi ideal. Kepemimpinan pemerintah yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap kegiatan karena pemimpin hanya berorientasi pada hasil bukan pada proses kegiatan. Selain itu, terbatasnya jumlah pendamping kegiatan sehingga seorang pendamping kegiatan harus menangani lebih dari satu desa menyebabkan komunikasi antara masyarakat sebagai pelaku dan pendamping sebagai bagian dar pemerintah menjadi kurang. Sehingga bawahan sehingga proses mempengaruhi masyarakat berjalan kurang optimal dan mengakibatkan kurangnya kesadaran untuk bekerja sama dan bekerja produktif.

Kebijakan pelaksanaan Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 24 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat. Kebijakan ini mengatur pelaksanaan program mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kebijakan ini merupakan faktor kedua yang menyebabkan terjadinya gap partisipasi masyarakat aktual dan ideal. Karena dalam kebijakan tersebut masih terdapat kecenderungan dominasi peran pemerintah dalam setiap tahap kegiatan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi adanya gap partisipasi masyarakat aktual dan ideal adalah kelembagaan. Kelembagaan pelaksanaan Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Plukaran secara struktur konkret adalah Kelompok Tani Sido Makmur sebagai pelaksana program. Struktur perilaku (behavior) Kelompok Tani Sido Makmur secara kuantitas beranggotakan 189 orang dan secara kualitas berdasarkan data dari ketua kelompok tani terdiri atas 89 orang dengan pendidikan terakhir SD, 85 orang dengan pendidikan terakhir SMP, 10 orang dengan pendidikan terakhir SMA dan 5 orang dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Kelompok Tani Sido Makmur masih rendah karena sebagian besar anggotanya hanya menamatkan pendidikan dasar. Sehingga kemampuan masyarakat untuk memiliki pengaruh dalam setiap tahapan program sangat kecil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menuju tingkat partisipasi ideal maka menurut Niern Chaipan & Thalister (1994); Chechoway (1995); Miltin & Thompson (1999) dalam Budiati (2006) harus dapat meningkatkan kemungkinan pertukaran gagasan (sharing idea), jalin kepentingan (knitting interst) dan pemaduan karya (synegy of action) diantara stakeholders dalam program. Melalui pendekatan partisipatif diharapkan program pemerintah mampu mempertanggungjawabkan aksinya terhadap masyarakat dengan proses-proses partisipasi yaitu pengembangan pola pikir dan pola sikap, pengkayaan pengalaman dan pengetahuan serta pembelajaran masyarakat untuk memperkuat asosiasi masyarakat terhadap program

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan pada Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Plukaran, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pada tahap perencanaan, tingkat partisipasi masyarakat untuk variabel prakarsa dengan indikator sumber ide dasar berada pada level informing dan consultation untuk indikator sumber usulan kegiatan. Sedangkan untuk variabel pengambilan keputusan tingkat partisipasi masyarakat berada pada level consultation.
- 2. Pada tahap pelaksanaan, tingkat partisipasi masyarakat untuk variabel pembiayaan berada pada level informing. Untuk variabel mobilisasi tenaga tingkat partisipasi masyarakat berada pada level community control. Sedangkan untuk variabel penyelesaian masalah tingkat partisipasi masyarakat berada pada level cooperation.
- 3. Pada tahap evaluasi, tingkat partisipasi masyarakat untuk variabel monitoring dan evaluasi berada pada level informing.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun 2009. Review Lahan Kritis di Wilayah Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun Tahun 2009. Semarang.
- Budiati, Lilin. 2006. "Penerapan Co-Management untuk Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan", Studi Kasus : Daerah Aliran Sungai Babon, Jawa Tengah. Disertasi. UGM. Yogyakarta.
- Budiati, Lilin. 2012. Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamdi, Nabeel dan Reinhard Goethert. 1997. Action Planning for Cities: A Guide to Community Practice. Chichester: Wiley & Sons Ltd.
- Khadiyanto, Parfi. 2007. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sekolah Baru. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawir, Ani Adiwinata, dkk. 2008. Rehabilitasi Hutan di Indonesia: Akan Kemanakan Arahnya Setelah Lebih dari Tiga Dasa Warsa. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Bappeda Kabupaten Pati, 2011.
- Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012. Menteri Kehutanan, 2012.
- Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 46 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 24 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat. Menteri Kehutanan, 2010.
- Slamet, 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soetrisno, Loekman, 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.